

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### a) Disharmonisasi Sosial

Suatu keadaan dikatakan disharmonisasi adalah keadaan yang biasanya mencerminkan suatu kondisi dalam situasi yang terjadi dalam sebuah kelompok dan kelompok ini adalah sekumpulan manusia. Disharmonisasi selalu berkaitan dengan keadaan sebuah rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila didalamnya (keluarga/rumah tangga) terdapat sebuah ketidakbahagian, maka keluarga tersebut dinyatakan disharmonisasi.

Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa disharmonisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang terlihat tidak bahagia dalam suatu kumpulan manusia dan biasanya itu terdapat dalam suatu keluarga.

##### b) Silaturahmi

Secara bahasa, silaturahmi dibentuk dari kata *Shilah* dan *Ar-Rahim*. Kata *shilah* berasal dari *washala-yashilu-wasl(an)wa shilat(an)*, artinya adalah hubungan. Adapun *ar-rahim* atau *ar-rahm*, jamaknya *arham*, yakni rahim atau kerabat. Asalnya dari *ar-rahmah* (kasih sayang), ia digunakan

untuk menyebut rahim atau kerabat karena orang-orang saling berkasih sayang, karena hubungan rahim atau kekerabatan itu. Di dalam al-Quran, kata *al-arham* terdapat dalam tujuh ayat, semuanya bermakna rahim atau kerabat. Dengan demikian, secara bahasa *shilah ar-rahim* (silaturahmi) artinya adalah hubungan kekerabatan.

Adapun pengertian secara syar'ī, banyak nash syariat yang memuat kata atau yang berkaitan dengan *shilah ar-rahim*. Maknanya bersesuaian dengan makna bahasanya, yaitu hubungan kekerabatan.

## **B. Teori-Teori yang Relevan**

### a) Teori Fungsional

Teori ini menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (*equilibrium*).<sup>1</sup>

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang

---

<sup>1</sup> Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung : Humaniora Utama Press: 2001) hal 182

fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Maka jika terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Singkatnya adalah masyarakat menurut kaca mata teori (fungsional) senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi: dinamika dalam keseimbangan.

#### b) Teori Konflik

Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang teori Fungsionalisme Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat adalah Teori Fungsionalisme Struktural. Tokoh utama Teori Konflik adalah Ralp Danrendorf.<sup>2</sup>

Jika menurut Teori Fungsionalisme Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan,

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 220

maka menurut Teori Konflik malah sebaliknya. Kalau menurut Teori Fungsionalisme Struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka Teori Konflik melihat bahwa setiap elemen atau institusi memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut Teori Fungsionalisme Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka Teori Konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan atas golongan yang berkuasa.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok dua, yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Adapun mengenai fungsi dari adanya konflik, Berghe mengemukakan ada empat hal:

---

<sup>3</sup> Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, (Penerbit Yayasan Obor Indonesia 1991). Hal 174

- a) Sebagai alat untuk solidaritas.
- b) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
- c) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.
- d) Fungsi komunikasi. Sebelum sebuah konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri, dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.<sup>4</sup>

Singkatnya, Teori Konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan.

c) Modal Sosial

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan),

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal 252

*reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial<sup>5</sup>. *Trust* (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif.

*Trust* merupakan produk dari norma-norma sosial kooperation yang sangat penting yang kemudian memunculkan modal sosial. Fukuyama, menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. *Trust* bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (*cost*), hal ini melihat dimana dengan adanya *trust* tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan individu.

Adanya *high-trust* akan terlahir solidaritas kuat yang mampu membuat masing-masing individu bersedia mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Bagi masyarakat *low-trust* dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya. Jika *low-trust* terjadi dalam suatu masyarakat, maka campur tangan negara perlu dilakukan guna memberikan bimbingan.

*Trust* (kepercayaan) dalam masyarakat RT 07 RW 10 Margorukun Gundih ini sangat diperlukan, tidak hanya antar masyarakat, namun antar pejabat kelurahan juga dibutuhkan suatu kepercayaan karena dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal 164

adanya kepercayaan ini maka akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang baik, dan tidak ada kecurigaan antara sesama masyarakat atau pejabat kelurahan RT 7 RW 10 Margorukun Gundih.

Unsur penting kedua dari modal sosial adalah *reciprocal* (timbang balik), dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial. Unsur yang selanjutnya yakni interaksi sosial. Interaksi yang semakin meluas akan menjadi semacam jaringan sosial yang lebih memungkinkan semakin meluasnya lingkup kepercayaan dan lingkup hubungan timbal balik.<sup>6</sup>

Jaringan sosial merupakan bentuk dari modal sosial. Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dll. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut.<sup>7</sup>

Dilihat dari tindakan ekonomi, jaringan adalah sekelompok agen individual yang berbagi nilai-nilai dan norma-norma informal melampaui nilai-nilai dan norma-norma yang penting untuk transaksi pasar biasa.

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal. 248

<sup>7</sup> Harry Hikmat, hal 184

Melalui pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa modal sosial dapat bermanfaat bukan hanya dalam aspek sosial melainkan juga ekonomi.

Timbal balik antara masyarakat dan pejabat kelurahan ini berperan penting dalam pembentukan RT 7 RW 10 Margorukun Gundih agar lebih baik. Timbal balik yang diberikan masyarakat dan pejabat kelurahan dapat menjadikan suatu titik ukur agar lebih maju. Dengan saling menerima dan saling membantu antar masyarakat yang muncul dari adanya interaksi sosial dapat menjadikan mereka lebih peka terhadap sesama masyarakat.

#### d) Teori Kepercayaan

James W. Fowler mengembangkan suatu teori yang disebutnya "*Faith Development Theory*". Teorinya ini lebih menjurus pada psikologi agama. Namun pendekatannya ini membantu kita dalam memahami tahapan perkembangan kepercayaan seorang manusia dan satu komunitas. Atau membantu dalam memahami alasan-alasan mengapa dan bagaimana seorang menjadi percaya atau beragama.<sup>8</sup>

Beragama bagi Fowler adalah bagian dari proses mencari makna, sebab itu menurutnya manusia adalah meaning maker (pemberi arti). Manusia adalah subyek yang bermakna dan memberi/menciptakan makna pada sesuatu atau pada iman, dan kepercayaan atau agama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2003) hal. 211

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 213

Proses memberi makna itu yang memperlihatkan bahwa manusialah yang menyusun suatu penjelasan terhadap berbagai pengertian yang semula tidak tersusun secara rapi. Fenomena-fenomena percaya awal adalah suatu susunan pemikiran dan pengertian yang ‘talamburang’ (tidak teratur). Manusialah yang menyusunnya. Dalam proses penyusunan itu manusia juga yang mencari suatu material/simbol (*sign*) yang sinonim atau bisa merepresentasi hal yang dipercayainya itu. Karena itu menjadi percaya, atau iman adalah juga suatu proses semantik yang dibuat oleh manusia.

Rupanya Fowler tidak mau terlalu dipusingkan dengan hal-hal semantik itu seperti halnya para antropolog agama seperti E.B. Tylor (di masa Klasik) atau Ruth Benedict dan Fiona Bowie (di masa modern).

Sederhananya bagi Fowler ialah ‘faith’ dimengertinya sebagai sesuatu yang luas dari sekedar ‘kepercayaan’ (belief), walau keduanya sinonim dengan ‘tindak pengartian’ (upaya memberi arti/menjelaskan). Sebab kepercayaan menyangkut mental untuk menciptakan, memelihara dan mentransformasi arti. Hasilnya adalah apa yang disebutnya sebagai “kepercayaan eksistensial”.

Kepercayaan eksistensial itu sendiri menurutnya merupakan suatu kegiatan relasional, artinya ‘berada-dalam-relasi-dengan-sesuatu’. Maka kepercayaan eksistensial diawali oleh rasa percaya. “Saya percaya dalam arti bahwa saya menyerahkan diri seluruhnya dan mengandalkan engkau”.

Hal itu berarti tiga hal. Pertama, kepercayaan sebagai cara seorang pribadi (atau kelompok) melihat hubungannya dengan orang lain, dengan siapa ia merasa dirinya bersatu berdasarkan latar belakang sejumlah tujuan dan pengertian yang dimiliki bersama. Ini menjurus pada adanya suatu ajaran yang membentuk ranah kognisi dalam hal menjadi percaya. Tetapi juga suatu sistem praktek yang membentuk ranah afeksi dan motorik.

Kedua, kepercayaan sebagai cara tertentu, dengan mana pribadi menafsirkan dan menjelaskan seluruh peristiwa dan pengalaman yang berlangsung dalam segala lapangan daya kehidupannya yang majemuk dan kompleks. Aktifitas menafsir (*interpretation*) dan menjelaskan (*clarification*) di sini mengamanatkan bahwa kepercayaan adalah bagian dari suatu hermeneutika kehidupan, yang terkait bukan dengan dokumen-dokumen kudus yang turut menyusun dogma agama melainkan dokumen-dokumen kehidupan yang selalu dijumpai manusia dalam pengalaman nyata di masyarakat/duniannya.

Ketiga, kepercayaan sebagai cara pribadi melihat seluruh nilai dan kekuatan yang merupakan realitas paling akhir dan pasti bagi diri dan sesamanya. Di sini ditentukan mana 'gambaran penuntun' mengenai yang ultim yang akhirnya dapat menggerakkan dan menjadi acuan hidup kita.<sup>10</sup>

Pada sisi ini muncul seperangkat etika dalam agama, serta ajaran mengenai Tuhan sebagai yang utama. Untuk merinci isi dari kepercayaan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 194

itu, Fowler membedakan antara *fides quae creditur*, yaitu substansi dan isi kognisi dari hal yang dipercayai, dan *fides qua creditur* yakni cara kita percaya akan hal tersebut.

Dengan demikian kepercayaan selalu ada dalam dialektika antara ajaran untuk menjadi percaya dan cara/praktek menjadi percaya. Apa yang disebut percaya tidak sekedar menerima secara taken for granted tetapi belajar secara kritis melalui praksis. Sebab apa yang menjadi isi kognisi (ajaran) sesungguhnya adalah kumulasi dari apa yang dialami dalam hidup sehari-hari. Beberapa teolog lain seperti John B. Cobb, jr, menunjukkan bahwa hal menjadi percaya baru datang pada saat manusia melakoni aktifitas sehari-hari (*dailiy activity*). Maka kepercayaan juga ditentukan oleh aktifitas dan peran sosial/tanggungjawab.

### **C. Harmonisasi dan Keseimbangan Kebudayaan**

Kebudayaan ibarat sebuah tenda yang menaungi berbagai aspek kehidupan manusia. Semakin tinggi dan luas tenda, semakin sehat aspek-aspek kehidupan yang berada di bawahnya, karena terbuka ruang lapang untuk mudah bergerak.

Sebaliknya semakin sempit dan rendah tenda yang menaungi membuat berbagai aspek yang dalam naungannya semakin sempit, pengap dan tidak ada ruang gerak. Hal ini berlaku untuk semua aspek kebudayaan seperti sistem kepercayaan dan religiusitas, kesenian, bahasa, organisasi sosial politik, sistem

pengetahuan, teknologi, ekonomi dan matapencaharian, dan pendidikan.

Bronislaw Malinowski mengajukan unsur pokok kebudayaan yang meliputi :

- a) Sistem normatif yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar dapat menguasai alam di sekelilingnya.
- b) Organisasi ekonomi.
- c) *Mechanism and agencies of education* yaitu alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas untuk pendidikan dan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- d) Organisasi kekuatan (*The Organization of Force*).

Bronislaw Malinowski sebagai penganut teori fungsional selalu mencari fungsi atau kegunaan setiap unsur kebudayaan untuk keperluan masyarakat.

Dalam sebuah tatanan masyarakat sangat diperlukan sebuah harmonisasi struktur, baik struktur norma maupun struktur lembaga. Dua hal yang menjadi kata kunci adalah faktor suprastruktur dan infrastruktur. Dalam perspektif budaya, kedua faktor ini memiliki relevansi dengan pemaknaan manusia atas karyanya, bahwa manusia mengkonstruksi kebudayaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Akzin, dalam struktur norma yang termasuk suprastruktur adalah norma hukum publik, sedangkan yang infrastruktur meliputi norma hukum keperdataan dan hukum perikatan. Sementara itu dalam struktur lembaga, suprastruktur meliputi pejabat negara dan pemerintahan dan rakyat sebagai infrastruktur.

#### **D. Modernisasi Pembangunan dan Disharmonitas**

Dalam perkembangan masyarakat, masyarakat dunia terutama dunia ketiga pada dekade 70'an dilanda sebuah sistem pembangunan yang dikenal dengan modernisasi. Modernisasi adalah rasionalisasi dalam pertumbuhan ekonomi secara makro. Secara teoritik modernisasi merupakan sebuah teori yang di dalamnya terdapat beberapa aliran. Ada lima varian teori Modernisasi sebagaimana dikemukakan oleh Arief Budiman yaitu :

- a) Teori Harrod-Domar, yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi dan teori ini banyak dikembangkan oleh para ekonom.
- b) Teori McClelland yang menekankan pada aspek-aspek psikologi individu yaitu melalui pendidikan individual kepada anak-anak di lingkungan keluarga, Pembangunan akan terlaksana apabila terdapat jumlah wiraswasta yang banyak.
- c) Teori Weber yang menekankan pada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai dalam masyarakat antara lain melalui agama mempunyai peran yang menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, proses pembangunan dalam masyarakat dapat terlaksana.
- d) Teori Rostow, yang menekankan pada adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan. Lembaga-lembaga politik

dan sosial diperlukan untuk menghimpun modal yang besar serta memasok tenaga teknis, tenaga wiraswasta dan teknologi.

- e) Teori Inkeles dan Smith yang menekankan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan, sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang dapat membangun. Teori ini dapat dilakukan dengan pemberian pengalaman kerja secara langsung. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk membentuk manusia modern.

Penggunaan istilah modern selalu dipertentangkan dengan tradisional. Modern merupakan simbol kemajuan, pemikiran rasional, cara kerja efisien dan merupakan ciri masyarakat maju. Sebaliknya masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang belum maju dengan ditandai cara berpikir irasional serta cara kerja yang tidak efisien. Menurut teori modernisasi, faktor-faktor non material sebagai penyebab kemiskinan khususnya dunia ide atau alam pikiran. Durkheim berpendapat bahwa modernisasi menyebabkan runtuhnya nilai-nilai tradisi.

Indonesia selama beberapa dekade pembangunan, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) menempatkan teori modernisasi dalam upaya pembangunan. Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa teori modernisasi yang terutama menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan.

Pelaksanaan teori ini sudah tentu membawa dampak, baik positif maupun negatif dan berpengaruh terhadap hubungan sinergitas antara

suprastruktur dan infrastruktur. Sebagaimana telah diketahui bahwa barometer keberhasilan sebuah pembangunan adalah dikotomi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan di sisi lain adanya pembangunan yang berkesinambungan yang berciri tidak terjadinya kerusakan sosial dan tidak terjadinya kerusakan alam.

Dalam kenyataan pembangunan yang telah dikembangkan di Indonesia selama tiga dekade sebelum reformasi, ternyata pada beberapa segi memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi meskipun dengan tidak adanya keadilan sosial, dan di sisi lain terjadi kerusakan sosial dan terjadinya kerusakan alam seperti hilangnya hutan adat dan hutan rakyat yang telah digantikan sistem pengelolaan hutan secara konglomerasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan sosial dan konflik-konflik sebagai dasar ketidakadilan dan ketidak harmonisan antara suprastruktur dan infrastruktur.

Surna T. Djajadiningrat menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi.

Dikaitkan dengan kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlangsungan

ekologis, misalnya sistem Subak di Bali atau pemaknaan hutan bagi suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku lain yang memiliki filosofi harmonisasi dengan alam. Keberlanjutan ekonomi yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif pembangunan.

Dalam keberlanjutan ekonomi makro tiga elemen yang diperlukan adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal ini akan dapat tercapai melalui kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat guna dalam proses struktural yang menyertakan disiplin fiskal dan moneter.

Sementara itu keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro akan diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik. Kegiatan ekonomi sektoral ini dalam bentuknya yang spesifik akan mendasarkan pada perhatian terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai kapital. Selain itu koreksi terhadap harga barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan biosfer keseluruhan sumber daya.

Dalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang merupakan perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Di bidang keberlanjutan politik terdapat pokok pikiran seperti perhatian terhadap HAM, kebebasan individu, hak-hak sosial, politik dan ekonomi, demokratisasi serta kepastian ekologis. Sedangkan keberlanjutan di bidang pertahanan dan keamanan adalah keberlanjutan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan.

Persoalan berikutnya adalah harmonisasi antar struktur (suprastruktur dan infrastruktur) dalam menghadapi atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang berkelanjutan. Apabila selama ini terjadi ketimpangan, maka yang terjadi adalah disharmonisasi yang berdampak pada hal yang lebih luas yaitu yang menyangkut nasionalisme, rasa kebangsaan dan “pudarnya negara bangsa”.

#### **E. Disharmonitas dan Pudarnya Negara Bangsa**

Berkaitan dengan pudarnya “negara bangsa” sebagai konsekuensi disharmoni supra-struktur dengan infrastruktur dalam pembangunan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang mendasarkan konsepsinya atas pandangan Benedict Anderson menyatakan bahwa pada masa lalu terbentuknya negara bangsa atau nation disebabkan oleh sebuah produk yaitu strategi sosial-budaya-politik guna menghadapi penjajah.

Namun pada masa kini negara bangsa yang merupakan “nation character building” itu berada dalam kepudaran sebagai akibat produk suatu deformasi strategi sosial-budaya-politik yang terwujud dalam tindakan dan keputusan sosial politik dari pihak-pihak yang memiliki akses ke kebijakan

publik, kekuasaan dan pengaruh. Lebih lanjut dikatakan keluhan tentang merosotnya semangat nasionalisme disebabkan kendornya ikatan sosial dan rasa solidaritas yang tercermin dalam tindakan menindas, menguras, dan memanipulasi untuk *kelanggengan* status sosial.

Dengan demikian bagaimanakah peran kebudayaan sebagai motor penggerak harmonisasi yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* pembangunan dan masyarakat plural. Dengan meminjam istilah Soetandyo Wignyosubroto bahwa pembangunan harus diimbangi dengan bea psikologik dan bea kultural (*the psychological costs and the cultural costs*) . Selama ini pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat.

Disharmoni pembangunan dan disrelasi antara supra dan infra struktur terjadi karena perubahan ke arah ekonomi dalam sudut pandang kepentingan nasional maupun lokal telah ditebus dengan *cultural cost* yang tinggi. Industrialisasi dan perubahan situasi lokal telah mengubah kearifan lokal.

Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa perubahan di dunia ekonomi mengakibatkan konflik yang dapat mengancam terjadinya disorganisasi dalam sistem sosial dan sistem budaya. Harmonisasi dapat dibentuk jika kebijakan-kebijakan politik yang menggerakkan seluruh proses pembangunan dan industrialisasi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang pragmatik dan jangka pendek, tetapi kebijakan politik juga harus memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah

dasar budaya lokal sebagai bentuk penghargaan pluralistik, untuk selanjutnya meng-akomodasikannya ke tuntutan perubahan yang terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>[http://www.google.com/search?q=pengertian+riset+aksi+partisipatori&oq=pengertian+riset+aksi+partisipatori&gs\\_l=heirloom-](http://www.google.com/search?q=pengertian+riset+aksi+partisipatori&oq=pengertian+riset+aksi+partisipatori&gs_l=heirloom-) (diakses pada tanggal 20 juli 2013)